

DAMPAK KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN

TESIS

Oleh

**HERU GUNAWAN
NPM. 131802017**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)11/5/23

ABSTRAK

DAMPAK KEGIATAN DESA MANDIRI PANGAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN

Nama : Heru Gunawan
NPM : 131802017
Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS
Pembimbing II : Dr. Syaifuddin Lubis, M.MA

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana karakteristik Desa Mandiri Pangan; (2) Untuk Mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah anggota kelompok affinitas penerima manfaat dan tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan setelah masuk kedalam tahap Pasca Kemandirian; dan (3) untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga terhadap kelompok affinitas penerima manfaat dan tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dekskriptif melalui survey. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan responden, sedangkan data skunder yang dikumpulkan meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dalam proses peningkatan pendapatan rumah tangga.

Kata kunci : *Desa Mandiri Pangan, Peningkatan, Rumah Tangga, Kabupaten Asahan*

ABSTRACT

IMPACT OF MANDIRI VILLAGE VILLAGE ACTIVITIES ON INCREASING HOUSEHOLD INCOME IN ASAHAN DISTRICT

Nama : Heru Gunawan
NPM : 131802017
Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS
Pembimbing II : Dr. Syaifuddin Lubis, M.MA

The objectives of this study are (1) to find out how the characteristics of the Mandiri Pangan Village; (2) To find out whether there is an increase in the number of members of the beneficiary affinity group and not the beneficiaries of the Food Independent Village activities after entering into the Post-Independence stage; and (3) to find out whether there is an increase in household income for the affinity group of beneficiaries and not beneficiaries of the Food Independent Village activities.

The method used in this research is descriptive research method through survey. Primary data is obtained through direct interviews with respondents, while secondary data collected includes developments in the development of the implementation of the Food Independent Village activities in the process of increasing household income.

Keywords: Independent Food, Improvement, Household, Asahan District

4.1.7. Organisasi dan Tata Kerja	44
4.1.8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	50
4.2. Karakteristik Desa Penelitian	53
4.2.1. Desa Meranti dan Serdang Kecamatan Meranti	53
4.2.2. Desa Bangun Sari dan Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji	54
4.2.3. Desa Sei Lama dan Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat	55
4.3. Karakteristik Responden.....	56
4.3.1. Status Usahatani Responden.....	56
4.3.2. Usia Responden	57
4.3.3. Tingkat Pendidikan.....	57
4.3.4. Status Kepemilikan dan Luas Lahan	58
4.3.5. Pengalaman Berusahatani Responden	59
4.4. Karakteristik Kelompok Affinitas	60
4.4.1. Aspek Kelembagaan Kelompok Affinitas	61
4.4.2. Kegiatan Keorganisasian Kelompok	62
4.4.3. Dampak Kegiatan Desa Mandiri Pangan terhadap Peningkatan Jumlah Anggota Kelompok.....	64
4.4.4. Dampak Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga terhadap Kegiatan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	71
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan di bidang ketahanan pangan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi dalam membangun sistem ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada peningkatan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Berdasarkan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2010), pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Hal ini difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yaitu dengan melaksanakan program Desa Mandiri Pangan (demapan) yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada implementasi program. Untuk mengukur keberhasilan program desa mandiri pangan, maka sangat penting untuk melakukan analisis mengenai dampak desa

mandiri pangan. Untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang

kondusif, menuju ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Tujuan program Desa Mandiri Pangan adalah untuk meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2011). Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Dalam pelaksanaannya, program Desa Mandiri Pangan difasilitasi dengan masukan antara lain: instruktur, pendampingan dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan (Soemarno, 2010).

Sejak tahun 2006, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian melaksanakan kedua strategi tersebut melalui Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Diharapkan akan berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di

(MDGs), yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015 (BKP Kementerian Pertanian, 2014).

Berdasarkan rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2010), pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Hal ini difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganeekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Karakteristik Demapan dalam pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan yaitu : kualitas sumberdaya masyarakat rendah, sumberdaya modal terbatas, akses teknologi rendah, dan infrastruktur perdesaan terbatas. Komponen Demapan meliputi : (1) pemberdayaan masyarakat; (2) penguatan kelembagaan; (3) pengembangan Sistem Ketahanan Pangan; (4) integrasi program sub sektor dan lintas sektor dalam menjalin dukungan pengembangan sarana prasarana perdesaan.

Dalam pelaksanaannya, program Desa Mandiri Pangan (Demapan) difasilitasi dengan masukan antara lain: instruktur, pendampingan dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan.

Program Desa Mandiri Pangan (Demapan) di Kabupaten Asahan sudah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Umuda sejak tahun 2010 hingga sekarang, merupakan kegiatan yang dilaksanakan

ditunjukkan oleh bagaimana respons masyarakat yang menjadi sasaran dari program-program pembangunan tersebut.

Dengan demikian beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik desa pelaksana kegiatan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan.
2. Bagaimana peningkatan jumlah anggota kelompok affinitas penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan dan kelompok tidak penerima manfaat Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan setelah masuk ke dalam tahap Kemandirian.
3. Bagaimana peningkatan pendapatan rumah tangga terhadap kelompok affinitas penerima manfaat dan kelompok tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik desa pelaksana kegiatan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan jumlah anggota kelompok affinitas penerima manfaat dan tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan setelah masuk ke dalam tahap Pasca Kemandirian

3. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga terhadap kelompok affinitas penerima manfaat dan kelompok tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini di harapkan memberi informasi bagi para pengambil kebijakan untuk menghasilkan perencanaan yang lebih baik dalam penerapan program Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan.
2. Penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai bahan evaluasi serta monitoring bagi pelaksana kegiatan Desa Mandiri Pangan di masing-masing desa pelaksana kegiatan.
3. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lebih lanjut dan pembaca, sebgai sumber literatur dan perbandingan, serta terutama menyangkut konsep Implementasi kegiatan Desa Mandiri Pangan dan kebijakan program pembangunan lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 dan disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Berdasarkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas*) Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 100 kabupaten rawan pangan yang tersebar di 23 propinsi, dengan rincian 30 kabupaten prioritas pertama, 30 kabupaten prioritas kedua dan 40 kabupaten prioritas ketiga. Kelompok rawan pangan prioritas tersebut menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapatkan prioritas khusus dalam penanganan masalah kerawanan pangan. Sedangkan sisanya (165 kabupaten) masuk dalam kelompok tahan pangan. Menurut BKP Kementerian

Berdasarkan dalam Batunajid dan Prishardoyo (2009), rawan pangan adalah kondisi

suatu daerah, masyarakat, atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya. Suatu daerah dikatakan rawan pangan dapat diukur dengan banyaknya jumlah rumah tangga prasejahtera yang relatif masih banyak karena alasan ekonomi, status gizi masyarakatnya yang ditunjukkan oleh status gizi balitanya, ketersediaan pangan daerah dan kerentanan pangan. Kerawanan pangan dalam penelitian Ratnasari dan Prishardoyo (2009), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan pangan rumah tangga miskin adalah pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif rumah tangga miskin karena merupakan faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi kemiskinan.

Hasil penelitian Dewan Ketahanan pangan dan *World Food Programme* pada tahun 2005 menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga di Indonesia belum merata. Pemetaan dari 265 Kabupaten di Indonesia terdapat 100 kabupaten yang rawan pangan dan gizi kronis. Penyebab kondisi rawan pangan dan gizi kronis adalah keterbatasan kepemilikan lahan, keterbatasan sumber sumberdaya alam dan pengetahuan serta tenaga kerja manusia, keterbatasan akses permodalan, serta kondisi sarana dan prasarana tidak memadai (Ariani dalam Jamhari, 2011).

Dalam rangka penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan tersebut dilaksanakan kegiatan Program Desa Mandiri Pangan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di desa rawan pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap

diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan dan akhirnya tercapai kemandirian masyarakat.

Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan (BKP Kementerian Pertanian, 2010). Program Desa Mandiri pangan merupakan program aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan kearifan lokal pedesaan. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam; (1) meningkatkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan; (2) meningkatkan distribusi dan akses pangan masyarakat; (3) meningkatkan mutu dan keamanan pangan desa; (4) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan (5) meningkatkan kualitas penanganan masalah pangan (Darwis dan Rusastra, 2011).

Tujuan Program Desa Mandiri Pangan adalah untuk meningkatkan

Ketahanan Pangan dan Gizi (mengurangi kerawanan pangan dan gizi) masyarakat

melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi. Dalam pelaksanaannya, Program Desa Mandiri Pangan akan difasilitasi dengan masukan antara lain : instruktur, pendamping dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan dalam mengelola aspek ketersediaan dan distribusi pangan dengan gizi seimbang dan aman, dan mampu mengatasi masalah pangan serta mampu membentuk aliansi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melawan kelaparan dan kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menurunkan kerawanan pangan dan gizi. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan program aksi mandiri pangan antara lain melalui: (a) penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menolong dirinya sendiri; (b) penguatan kelembagaan pedesaan dalam membangun ketahanan pangan dan gizi, peningkatan pendapatan, akses dan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang, sanitasi lingkungan serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA
antisipasi studi darurat, (c) optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan

dukungan multi sektor dan multi disiplin; (d) sinergitas antar *stakeholder* yang diwujudkan melalui peningkatan kemampuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dalam bekerjasama dengan *stakeholder* lain dan memfasilitasi Tim Pangan di tingkat desa.

2.2. Konsep Pendapatan

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk, hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan (Todaro, 2000). (Samuelson dalam Zuhri, 2007 : 19) mengemukakan tentang pendapatan per kapita yaitu bahwa semua pendapatan dibagi rata dan sama untuk semua orang laki-laki, wanita, maupun anak-anak. Pendapatan nasional per kapita merupakan penentu yang penting bagi potensi perekonomian negara yang bersangkutan (Todaro, 2003). Secara umum pendapatan suatu usaha adalah selisih antara penerima total dengan biaya yang dikeluarkan. Penerimaan adalah nilai uang yang diterima dari penjualan produk usaha (Soekartawi, 1988).

Menurut Mubyarto (1989), pendapatan adalah arus kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan diantara berbagai alternative penggunaan sumber-sumber yang langka. Artinya jika orang harus memanfaatkan suatu sumber kehidupan tersebut belum dapat dijangkau dalam pemanfaatannya seperti tanah yang belum digarap oleh manusia, maka tidak ada pilihan lain yang tersedia sebagai alternatif seperti berburu dan mengumpulkan hasil-hasil yang dapat diperoleh. Soekartawi (1988) membedakan pendapatan menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan yang berupa uang.

Pendapatan yang berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi, sumber-sumber utamanya adalah:

- a. Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan, kerja lemburan dan kerja kadang-kadang (serabutan).
- b. Dari usaha sendiri yang meliputi: hasil bersih dari usaha sendiri, komisi dan penjualan dari kerajinan rumah.
- c. Dari hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah.
- d. Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.

2. Pendapatan berupa barang

Pendapatan yang berupa barang yaitu segala penghasilan yang sifatnya regular dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam bentuk barang atau jasa. Pendapatan berupa:

- a. Bagian pembayaran upah dan gaji yang dibentuk dalam beras, pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi.
- b. Beras yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.
- c. Penerimaan yang merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai,

penagihan piutang, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah atau pemberian uang.

2.3. Karakteristik Penduduk Miskin

Menurut Suryawati (2005), menjelaskan ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin yaitu : (1) Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan. (2) Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. (3) Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja). (4) Kebanyakan berada di daerah pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (Slum area). (5) Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup) bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya. Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani garam, pedagang kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, pengemis dan pengangguran.

Kemiskinan merupakan penyebab akses pangan berupa daya beli pangan masyarakat menurun. Dengan demikian kondisi masyarakat yang miskin sangat rentan terhadap kerawanan pangan. Keterbatasan asset untuk mengakses sumber daya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam bentuk usaha berbasis lokal merupakan penyebab kemiskinan.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia lainnya,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/5/23

karena kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terpuruk dari kemiskinan yang dihadapi masyarakat, dimana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses sebab-akibat dari kemiskinan, oleh sebabnya usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha penanggulangan masalah kemiskinan.

Program ketahanan pangan diharapkan mampu menurunkan dampak kemiskinan masyarakat sehingga mampu menurunkan tingkat kerawanan pangan dan status gizi. Pada tingkat rumah tangga kemiskinan berakibat ketidak mampuan rumah tangga dalam mencukupi pangan untuk memenuhi standar fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya.

Kerawanan pangan dibedakan atas kerawanan kronis dan kerawanan sementara. Rawan kronis terjadi terus menerus karena ketidak mampuan rumah tangga untuk membeli atau memproduksi pangan sendiri. Sedangkan kerawanan sementara terjadi karena faktor luar yang dominan mempengaruhinya akibat kondisi yang terduga misalnya bencana alam atau korban kerusuhan dan lainnya (BKP Kementerian Pertanian, 2011).

2.4. Kinerja Program Demapan

Program Desa Mandiri Pangan diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di perdesaan secara efisien dan berkelanjutan sehingga tercapai kemandirian, berarti

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/5/23

hal ini berhubungan dengan peran kelembagaan yang salah satunya memegang peranan penting didalam pengembangan usaha produktif yaitu kelompok affinitas yang dibentuk oleh masyarakat pedesaan yang diberdayakan untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Secara umum kinerja kegiatan Demapan dalam derajat tertentu telah menunjukkan beberapa keberhasilan (Rusastra, dkk., 2008) yaitu : (1) Infrastruktur tersedia dari lintas sektor, meskipun belum sesuai kebutuhan; (2) Kelompok Affinitas dalam batas tertentu telah berhasil diperdayakan melalui pelatihan, sekolah lapang, dan studi banding keberbagai tempat; (3) Sekolah Lapang (SL) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan, SL yang masih diperlukan adalah SL kelembagaan financial, SL pemasaran hasil, SL kewirausahaan; (4) aksesibilitas terhadap prasarana input dan output makin baik; (5) aksesibilitas terhadap komunikasi dan informasi juga makin baik dengan adanya prasarana telpon; (6) Program Demapan telah meningkatkan kemauan dan kemampuan kelompok affinitas secara signifikan; (7) keberhasilan pemerintah desa dan kabupaten dalam membangun persepsi dan kesepahaman bahwa dana Demapan adalah dana abadi, sehingga pengelolaan dilakukan dengan baik.

2.5. Koordinasi Program dan Kelembagaan Demapan

Program demapan dirumuskan oleh kelompok kerja (pokja) yang berfungsi sebagai simpul koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan program aksi secara berjenjang dimulai dari : (1) tingkat desa yang terdiri dari kepala desa dan Tim

Pangan Desa; (2) tingkat Kabupaten, Provinsi dan pusat yang menangani ketahanan pangan.

Penetapan Desa Mandiri Pangan berdasarkan kriteria : (1) desa rawan pangan yang minimal KK miskin 30 persen dari penduduk desa yang disurvei melalui Data Dasar Rumah Tangga (DDRT); (2) memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang belum dikembangkan ; (3) aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang sangat tinggi dan kesediaan menerima program yang diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap implementasi program di lapangan.

Kelembagaan yang ada dalam program Demapan adalah : (1) kelompok affinitas sebagai penerima program; (2) tenaga pendamping yang bertugas membina kelompok affinitas; (3) Tim Pangan Desa yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok affinitas, PKK dan kader gizi yang nantinya bertugas membina kelompok afinitas dan mengkoordinasikan kegiatan lintas sektoral; (4) Lembaga Keuangan Desa yang nantinya bertugas mengelola masalah keuangan dan usaha kelompok affinitas.

Peran kelembagaan petani yang mendukung keberlanjutan pertanian diberikan kriteria :

1. Substistem Sarana

Perencanaan, pengelolaan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi yang memungkinkan penerapan suatu teknologi usaha tani dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara optimal;

Pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, baik usaha tani pertanian rakyat maupun usaha tani besar;

3. Subsistem Pengolahan

Pengolahan hasil secara sederhana ditingkat petani dan penanganan pasca panen komoditi pertanian yang dihasilkan sampai pada tingkat pengolahan lanjut selama bentuk susunan dan citarasa komoditi tersebut tidak berubah;

4. Subsistem Pemasaran

Pemasaran hasil usaha tani yang masih segar atau hasil olahannya mencakup kegiatan distribusi dan pemasaran di dalam negeri dan ekspor;

5. Subsistem Pelayanan atau Pendukung (BKP Kementerian Pertanian, 2011).

Sedangkan efektifitas kelembagaan petani diidentifikasi seberapa jauh peran yang sudah dilakukan mempengaruhi petani dalam berusaha tani secara ideal (sesuai dengan petunjuk yang ada) pada masing-masing subsistem agribisnis baik sebagai penyedia informasi maupun sebagai penyedia fisik/jasa. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peran lembaga petani diidentifikasi baik yang berasal dari karakteristik lembaga itu sendiri atau yang merupakan karakteristik petani anggota dari lembaga serta adanya peran lembaga/individu lain.

2.6. Konsep Desa Mandiri Pangan

Kegiatan Desa mandiri Pangan merupakan salah satu bentuk campur tangan pemerintah dalam usaha penanggulangan dan mengurangi daerah-daerah rawan pangan pada suatu daerah ditentukan oleh aspek pemanfaatan pangan, aspek ketersediaan pangan dan aspek akses pangan. Apabila dalam ketiga aspek tersebut terdapat aspek yang masih kurang maka desa tersebut bisa termasuk kategori desa rawan pangan.

Kegiatan ini diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat berupa pengembangan kerjasama dan partisipasi inklusif (SK Mentan Nomor 06 Tahun 2014, Pedoman Teknis Demapan, 2014). Masyarakat dalam desa mandiri pangan diamanatkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahap kegiatan sehingga kegiatan ini lebih mengarah pada bertemunya pendekatan pembangunan *top down* dan *bottom up*.

Secara riil operasional program baik dalam penentuan lokasi dan operasional awal pelaksanaan program terdapat kesenjangan karena masih menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat *top down* dalam artian, proses perencanaan, penentuan lokasi, penentuan tahapan kegiatan dan pelaksanaan program awal belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan Demapan Program dirancang dalam kurun waktu empat tahun melalui empat tahapan yaitu :

1. Tahap Persiapan, seleksi desa rawan pangan dan pembentukan kelompok KK miskin.

2. Tahap Penumbuhan, mulai adanya usaha produktif, pembentukan Lembaga Keuangan Desa (LKD), berfungsinya posyandu dan bekerjanya sistem ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta koordinasi program lintas sektor untuk pembangunan sarana prasarana wilayah perdesaan
3. Tahap Pengembangan, adanya perkembangan ekonomi produktif, peningkatan modal Lembaga Keuangan Desa (LKD), pengembangan sistem ketahanan pangan
4. Tahap Kemandirian, adanya kemitraan, berfungsinya Lembaga Keuangan Desa (LKD) sebagai layanan modal dan berfungsinya Tim Pangan Desa dalam mengkoordinasikan program lintas sektoral.

2.7. Penelitian Mengenai Kegiatan Desa Mandiri Pangan

Berdasarkan hasil penelitian Husinsyah (2009) bahwa dampak desa mandiri pangan terhadap tingkat ketahanan pangan masyarakat di Kampung Birang Kecamatan Tabur Kabupaten Berau sangat kuat sebesar 82 %, sedangkan sisanya 18 % dipengaruhi oleh faktor lain, dimana kegiatan program desa mandiri pangan yang telah efektif dilaksanakan adalah pelatihan, penguatan modal, sarana dan prasarana, dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan perbedaan sebelum dan sesudah pelaksanaan program desa mandiri pangan, dimana rata-rata pendapatan sebelum program sebesar Rp. 4.049.673.41 sedangkan sesudah sebesar Rp. 6.990.689.66.

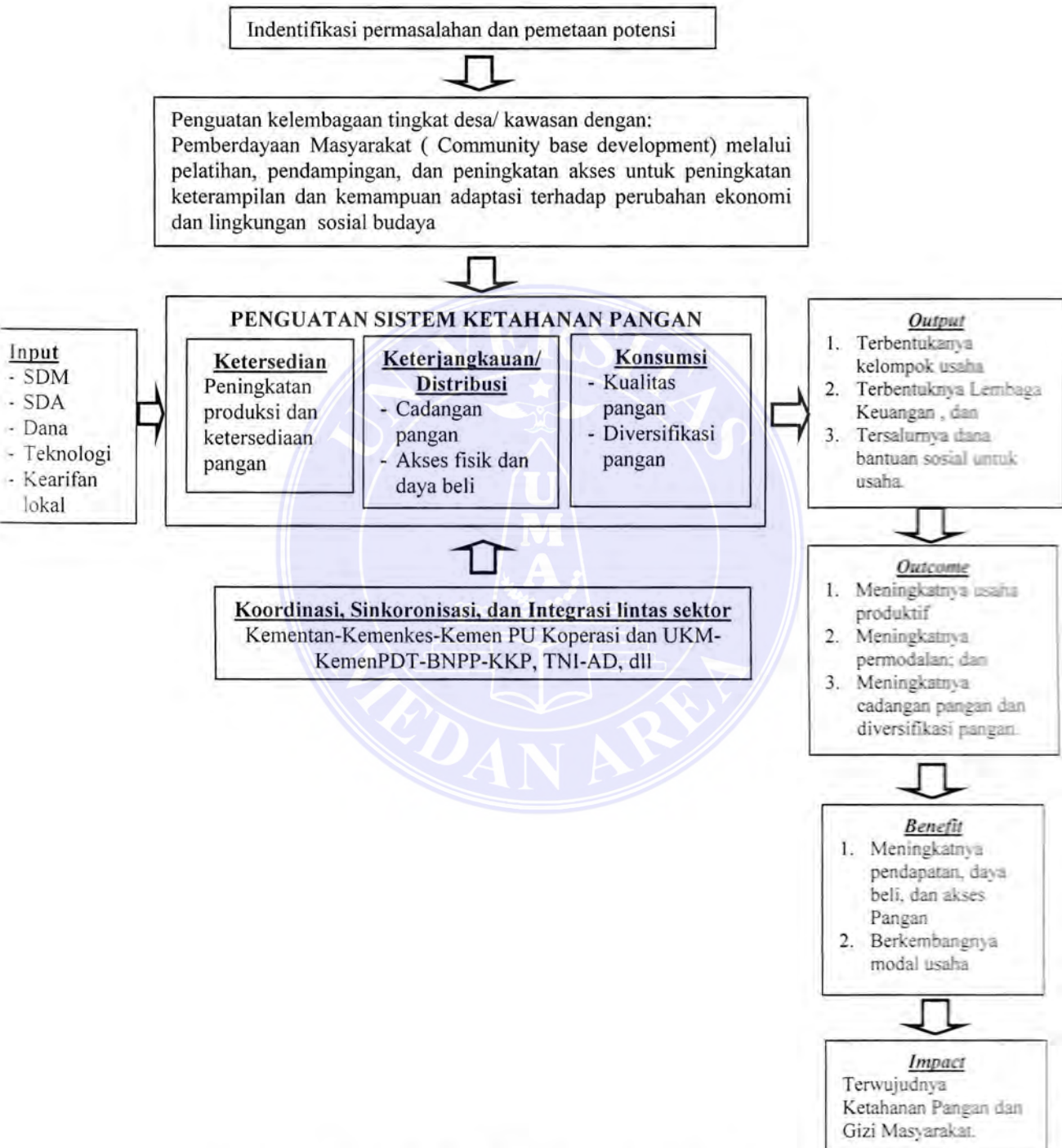
Menurut Mulyono (2008) bahwa beberapa manfaat yang dirasakan setelah mendapat program ini antara lain adalah anggota kelompok dapat belajar berorganisasi, tubuh rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat, serta konsumsi gizi semakin beragam dan makin baik. Gizi buruk atau kekurangan pangan tidak lagi terjadi karena anggota kelompok memiliki cadangan pangan di tingkat rumah tangga maupun di desa dalam bentuk lumbung pangan.

Selain itu juga dikaji mengenai dampak kegiatan demapan terhadap pendapatan rumah tangga. Pada penelitian ini tidak menggunakan metode regresi logistik multinomial seperti yang digunakan pada metode penelitian sebelumnya dengan pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah untuk melihat perbedaan pendapatan rumahtangga sebelum dan setelah adanya kegiatan demapan.

2.8. Kerangka Pemikiran

Sasaran akhir kegiatan Demapan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat miskin di desa rawan pangan, maka indikator *output* yang diharapkan, antara lain: (1) terbentuknya kelompok-kelompok Affinitas yang mengembangkan usaha produktif; (2) terbentuknya LKD; dan (3) tersalurkannya dana bantuan sosial untuk menambah permodalan usaha produktif. Diharapkan upaya ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan daya beli, gerakan tabungan masyarakat, peningkatan Ketahanan Pangan rumah tangga, perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya pangan, serta peningkatan keterampilan dan

pengetahuan masyarakat. Kerangka pikir kegiatan Desa Mandiri Pangan dapat dilihat pada Gambar 1.

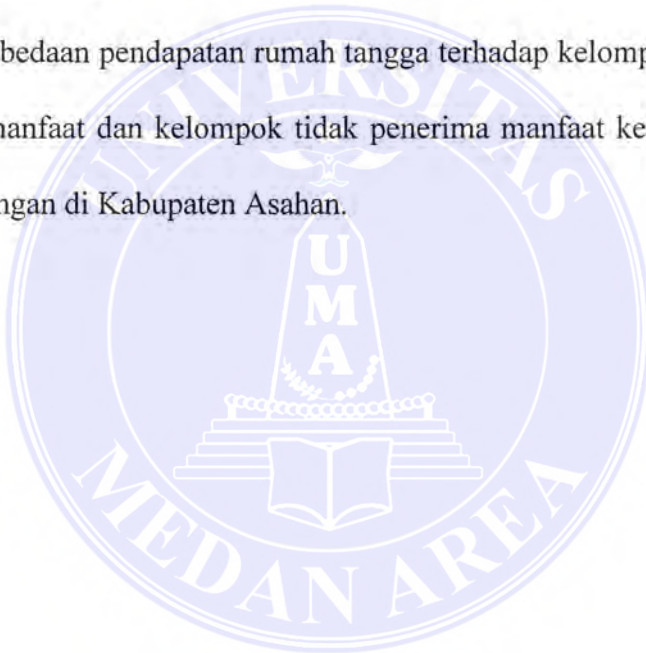


Gambar 1. Kerangka Pikir Kegiatan Desa Mandiri Pangan

2.9. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya perbedaan jumlah anggota kelompok affinitas penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan dan kelompok tidak penerima manfaat Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan setelah masuk ke dalam tahap Kemandirian.
2. Adanya perbedaan pendapatan rumah tangga terhadap kelompok affinitas penerima manfaat dan kelompok tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Asahan.



III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di 3 (tiga) Kecamatan wilayah Kabupaten Asahan propinsi Sumatera Utara pada desa penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan, diantaranya Desa Meranti Kecamatan Meranti, Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji dan Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat serta desa tidak penerima manfaat diantaranya desa Serdang Kecamatan Meranti, Desa Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji dan Desa Sipaku Area Kecamatan Simpang Empat. Daerah pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive sampling*), dengan dasar pertimbangan daerah ini merupakan desa / rumah tangga rawan pangan dengan jumlah KK miskin yang tinggi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2015.

3.2. Bentuk Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yaitu kelompok affinitas penerima manfaat Desa Mandiri Pangan dan desa tidak penerima manfaat.

Data Sekunder diperoleh dari Badan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, Dinas Pertanian Kabupaten Asahan, Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik Kab Asahan, Kepala Desa Pelaksana Kegiatan Demapan

serta instansi terkait yang dianggap dapat menjadi pendukung penyempurnaan laporan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari observasi lapangan, kepustakaan dan internet.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak terkait, penyebaran kuisioner dan studi literatur. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan responden dengan harapan agar peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai karakteristik responden, karakteristik desa pelaksana, karakteristik kelompok Affinitas dan pendapatan rumah tangga. Pengumpulan data dengan cara ini dilengkapi dengan kuisioner yang berisikan daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan kuisioner bermanfaat sebagai pemandu agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknis penggunaan atau pengisian kuisioner oleh responden akan dipandu oleh peneliti. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan dalam proses peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain itu, juga dikumpulkan data-data penunjang seperti gambaran umum lembaga di desa dalam hal ini Kelompok Affinitas penerima manfaat Demapan serta potensi hasil pertanian di wilayah peneliti.

3.4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif melalui survey. Metode meneliti status kelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa yang akan datang.

3.5. Populasi dan Sempel

3.5.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok affinitas penerima manfaat kegiatan desa mandiri pangan dan kelompok tidak penerima manfaat kegiatan desa mandiri pangan di Kabupaten Asahan yang totalnya sejumlah 45 orang.

3.5.2. Sampel dan Metode Penarikan Sampel

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 31 orang kelompok penunjang Desa Mandiri Pangan yang berdasarkan pada metode Slovin (1996) dalam Prihartono, 2009 yang menggunakan Rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi yaitu 10 persen.

Dengan rumus Slovin tersebut maka jumlah sampel penelitian adalah :

$$n = \frac{45}{1 + 45 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{45}{1 + 0,45}$$

$$n = \frac{45}{1,45}$$

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/5/23

$n = 31.03$ Maka dibulatkan menjadi 31.

Kemudian penentuan sampel untuk masing-masing kelompok affinitas penunjang Desa Mandiri Pangan dan kelompok tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan, dilakukan dengan menggunakan metode *Proportional random sampling* yaitu pengambilan sampel dengan menetapkan jumlah tergantung besar kecilnya sub populasi atau kelompok yang akan diwakilinya (Mardikanto, 2006).

Tahap tahap penentuan sampel adalah :

- a. Tahap pertama, adalah dengan mendata kelompok affinitas penunjang Desa Mandiri Pangan atau rumah tangga penerima bantuan sosial penguatan modal usaha produktif dan rumah tangga tidak penerima manfaat.
- b. Tahap kedua, setelah diperoleh data kelompok affinitas penunjang Desa Mandiri Pangan yang dimaksud, kemudian diambil secara proporsional dari masing masing kelompok. Penentuan jumlah sampel responden untuk masing masing kelompok penerima Bantuan Sosial dan tidak penerima bantuan sosial ditentukan dengan rumus (Sugiyono, 2009) :

$$n_i = \frac{nk}{N} \cdot n$$

Dimana :

n_i : Jumlah sampel dari masing masing kelompok affinitas penunjang Desa Mandiri Pangan dan kelompok tidak penunjang Desa Mandiri Pangan

- nk : Jumlah anggota kelompok dari masing masing kelompok affinitas penunjang Desa Mandiri Pangan dan kelompok tidak penunjang Desa Mandiri Pangan
- N : Jumlah populasi atau jumlah seluruh kelompok affinitas penunjang Desa Mandiri Pangan dan kelompok tidak penunjang Desa Mandiri Pangan
- n : Jumlah responden sebanyak 31.

Jumlah sampel dalam penelitian sesuai dengan rumus diatas adalah :

Tabel 2. Desa Penerima Manfaat kegiatan Demapan Tahun 2010 s/d Tahun 2012

No	Desa / Kecamatan	Tahun Pelaksana	Kelompok Affinitas	Jumlah Anggota	Sampel
1	Desa Meranti Kecamatan Meranti	2010	Meranti Jaya	15	10
2	Desa Bangun Sari Kecamatan Setia Janji	2011	Tani Maju	15	10
3	Desa Sei Lama Kec Simpang Empat	2012	Sopo Yono	15	11
Jumlah				45	31

Tabel 3. Desa Tidak Penerima Manfaat kegiatan Demapan Tahun 2010 s/d Tahun 2012

No	Desa / Kecamatan	Tahun Pelaksana	Kelompok Affinitas	Jumlah Anggota	Sampel
1	Desa Serdang Kecamatan Meranti	2010	-	15	10
2	Desa Sei Silau Tua Kecamatan Setia Janji	2011	-	15	10
3	Desa Sipaku Area Kec Simpang Empat	2012	-	15	11
Jumlah				45	31

3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa: (1) peningkatan jumlah anggota kelompok

afinitas dalam kegiatan Desa Mandiri Pangan, (2) pendapatan rumah tangga

terhadap kelompok affinitas penerima manfaat Desa Mandiri Pangan dan kelompok tidak penerima manfaat Desa Mandiri Pangan (Demapan).

Untuk menguji hipotesis pertama dan kedua di gunakan uji beda rata rata (t-test) yaitu dengan membandingkan rata rata peningkatan jumlah anggota kelompok Affinitas dengan rata-rata jumlah anggota bukan kelompok Affinitas Desa Mandiri Pangan, serta rata rata pendapatan rumah tangga kelompok affinitas penerima manfaat bansos kegiatan Desa Mandiri Pangan dan kelompok tidak penerima manfaat Desa Mandiri Pangan (Demapan) menggunakan Uji-t dengan rumus paired sampel t-test sebagai berikut :

$$t = \frac{D}{\frac{SD}{\sqrt{N}}}$$

Keterangan :

t : Nilai t hitung

D : Rata rata selisih pengukuran 1 dan 2

SD : Standart deviasi selisih pengukuran 1 dan 2

N : Jumlah sampel.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan kriteria uji :

- a. Jika Nilai t hitung \leq Nilai t tabel, maka H_0 tidak ditolak, sehingga $\mu_1 = \mu_0$ yang berarti bahwa fluktuasi peningkatan pendapatan rumah tangga tidak berbeda nyata terhadap desa penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan dan desa tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan.

- b. Jika Nilai $t_{hitung} \geq$ Nilai t_{tabel} , maka H_0 tidak ditolak (terima H_1), sehingga $\mu_{p1} \neq \mu_{p0}$ yang berarti bahwa fluktuasi peningkatan pendapatan rumah tangga berbeda nyata terhadap desa penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan dan desa tidak penerima manfaat kegiatan Desa Mandiri Pangan.

(sumber t-test/SAM/F.Psi.UA/2006).

3.7. Defenisi Oprasional Penelitian

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
3. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/5/23

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

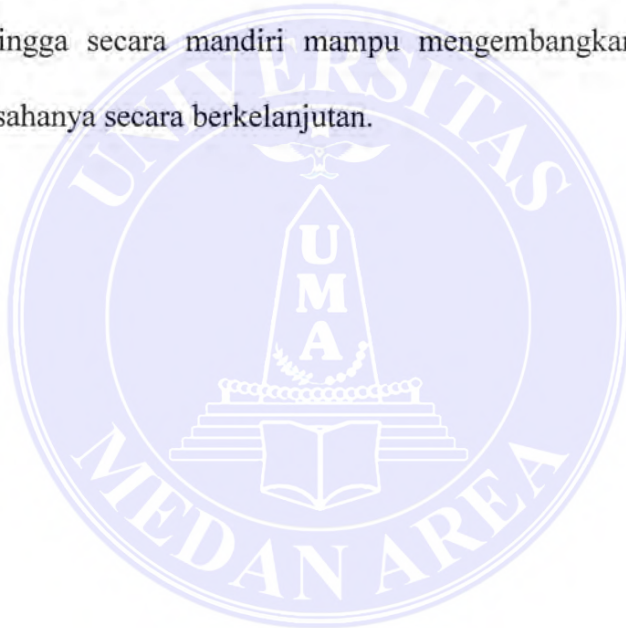
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan.
6. Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
7. Kawasan Mandiri Pangan adalah kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari kampung-kampung terpilih (5 kampung/ Desa), untuk menegakkan masyarakat miskin/ rawan pangan menjadi kaum mandiri.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat atau mereka yang kurang beruntung dalam perolehan sumber daya

pembangunan didorong untuk mandiri dengan mengembangkan kehidupan sendiri.

9. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Desa Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah yang tingkat ketersediaan, akses, dan/ atau keamanan pangan sebagian masyarakat dan rumah tangganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan atau desa dengan jumlah Kepala Keluarga Miskin > 30 % (tiga puluh persen).
11. Kemandirian adalah sikap kesadaran/ kemampuan untuk mengembalikan keadaan ke normal setelah terjadinya suatu tekanan, gejolak, atau bencana.
12. Kelompok Affinitas adalah kelompok yang tumbuh atas dasar ikatan kebersamaan dan kecocokan antar anggota yang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan memperhatikan sosial budaya setempat.
13. Kelompok Usaha adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan, dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama.
14. Data Dasar Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat DDRT adalah kegiatan pendataan lengkap (sensus) rumah tangga yang memperoleh gambaran karakteristik rumah tangga yang berada didalamnya.

15. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah rumah tangga sasaran yang ditetapkan melalui survei DDRT dengan 13 indikator kemiskinan: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, konsumsi pangan, konsumsi non pangan, modal (lahan, tabungan, hewan ternak), sarana transportasi, perabotan rumah tangga, luas tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, sumber air minum, sumber penerangan, asupan gizi, dan porsi pangan antar anggota rumah tangga.
16. Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya di singkat LKD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok, yang beranggotakan sub-sub kelompok Affinitas untuk mengelola keuangan sebagai modal usaha produktif pedesaan.
17. Lembaga Keuangan Kawasan adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh kelompok masyarakat dalam suatu kawasan, yang bertugas untuk mengelola keuangan bersama sebagai modal usaha produktif.
18. Tim Pangan Desa yang selanjutnya disingkat TPD adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat yang terdiri dari aparat Desa, tokoh masyarakat, penggerak PKK, perwakilan kelompok rumah tangga miskin yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan Ketahanan Pangan di pedesaan.
19. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok, yang nantinya

20. Dana Belanja Bantuan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan Bantuan Sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/ masyarakat pertanian yang mengalami resiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
21. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Terjadinya perbedaan jumlah anggota kelompok affinitas penerima manfaat desa mandiri pangan bila dibandingkan dengan kelompok tidak penerima manfaat desa mandiri pangan.
2. Terjadinya perbedaan pendapatan rumah tangga antara kelompok tidak penerima manfaat kegiatan desa mandiri pangandengan kelompok affinitas penerima manfaat desa mandiri pangan, yang disimpulkan bahwa kegiatan desa mandiri pangan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kepada kelompok affinitas penerima manfaat kegiatan desa mandiri pangan agar tetap mengembangkan dan membantu serta mengawasi dalam segala bidang demi tercapainya program pemerintah.
2. Kepada pendamping kelompok diharapkan tetap membantu kelompok dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan demi meningkatkan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyono, 2008. *Studi Partisipasi Masyarakat Pada program Desa Mandiri Pangan di Desa Muntuk*, Kabupaten Bantul, Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan, 2014, *ASDA (Asahan Dalam Angka)*. Kabupaten Asahan Sumatera Utara.
- Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia, 2014. *Pedoman Desa Mandiri Pangan*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia. 2010. *Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan 2010-2014*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan, 2011. *Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. 2011. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2012. *Pedoman Umum Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Darwis Valeriana dan Rusastra I.W. 2011. *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi PUAP dengan Desa Mandiri Pangan*. Jurnal : Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 9 No 2 Juni 2011, Halaman 125-142 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, Bogor.
- Jamhari. 2011. *Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ISBN 978-979-971-149-3-0
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES
- Ratnasari M dan Priharsdoyo B. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan Pangan Rumah Tangga Miskin Di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*. Jurnal Jejak Volume 2 Nomor 2, Halaman 135-143
- Rusastra I W., Supriyati, W.K.Sejati dan Saptana 2008, *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perdesaan : Analisis Program Ketahanan Pangan dan Desa Mandiri Pangan*. Laporan hasil Penelitian. Badan ketahanan Pangan. Departemen Pertanian, Jakarta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)11/5/23

- Soekartawai. 1988. *Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran Hasil pertanian Teori dan Aplikasi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryawati, 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. JMPK Vol. 08/N0.03/September/2005.
- Soemarno. 2010. *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Petani*. Tulisan Ilmiah. Jurusan Tanah FPUB.
- Todaro, M. P., 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 dan 2. Terjemahan Haris Munandar. Jakarta:
- Zuhri, A., 2007. *Analisis Pelaksanaan P2KP Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Desa Sedayu, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang*. Tesis. Program Pascasarjana. Banda Aceh: Unsyiah.

